

PEKAN WAYANG INDONESIA DAN PENGARUH ORDE BARU DALAM KESENIAN WAYANG (1969-1993)

Kuncoro Hadi, H.Y. Agus Murdiyastomo, Zukhrufa Ken Satya Dien
Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Yogyakarta
Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

hkuncoro@uny.ac.id, agus_murdiyastomo@uny.ac.id, zukhrufa.ken@ui.ac.id

Abstrak

Eksistensi budaya khususnya kesenian wayang di Jawa masa Orde Baru menarik untuk diteliti. Pada masa Orde Baru, kesenian wayang tidak hanya dikembangkan tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh kepentingan Orde Baru dalam kesenian wayang melalui berbagai kebijakan, termasuk diselenggarakannya Pekan Wayang Indonesia. Dengan fokus pada dua hal yaitu, *pertama*, bagaimana keterlibatan Orde Baru dalam struktur pelebagaan pewayangan. *Kedua*, bagaimana pengaruh kepentingan politik negara melalui penanaman gagasan pembangunan nasional serta Pancasila dalam pentas wayang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode sejarah. Ada empat langkah metode sejarah. *Pertama*, pencarian sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian (heuristik). *Kedua*, kritik sumber yang meliputi kritik ekstern dan kritik intern (verifikasi). *Ketiga*, penafsiran fakta-fakta sejarah (interpretasi). *Keempat*, penulisan sejarah (historiografi). Sumber utama dalam penelitian ini mencakup dokumen hasil sarasehan Pekan Wayang Indonesia dan hasil kongres Senawangi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya Pekan Wayang Indonesia yang dimulai pada 1969 hingga 1993 menjadi bagian penting pelebagaan wayang yang dilakukan Orde Baru. Dalam Pekan Wayang terdapat sarasehan yang membahas tidak hanya teknik pentas wayang, tetapi juga peran wayang serta pelebagaan wayang yang melahirkan Sekretariat Nasional Wayang Indonesia (Senawangi) pada 1975. Struktur-struktur pelebagaan ini melibatkan elit pemerintahan, terutama tokoh-tokoh militer, termasuk juga budayawan negara. Wayang diarahkan dan menjadi bagian dari pembangunan nasional Orde Baru, terutama pembangunan kebudayaan yang harus sesuai dengan Pancasila, dengan cara internalisasi nilai-nilainya.

Kata kunci: Pekan Wayang, Pancasila, Orde Baru.

Abstract

The existence of culture, particularly puppetry in Java during the New Order era, is an interesting subject of study. During the New Order era, puppetry was developed and utilized for governmental purposes. This study examines New Order influence on puppetry through various policies, including the organization of Pekan Wayang Indonesia (Indonesian Wayang Weeks Forum). How the New Order was involved in the institutional structure of puppetry. How the state's political interests

were advanced through the inculcation of national development ideas and Pancasila in wayang performances during the New Order period. This research is a literature study using the historical method. There are four steps of the historical method. First, the search for sources related to the research (heuristics). Second, source criticism which includes external criticism and internal criticism (verification). Third, interpretation of historical facts (interpretation). Fourth, historical writing (historiography). The primary sources in this research include documents from the Pekan Wayang Indonesia workshop and the Senawangi congress. The results show that the presence of Pekan Wayang Indonesia, which began in 1969 until 1993, became an important part of the institutionalization of wayang and the influence of the New Order. During Pekan Wayang, there were workshops that discussed not only puppet performance techniques but also the role of puppets and the institutionalization of puppets, which gave birth to the National Secretariat of Indonesian Puppetry (Senawangi) in 1975. These institutionalized structures involved government elites, especially military figures and state culturists. Wayang was directed and became part of the New Order's national cultural development that had to be in accordance with Pancasila, by internalizing its values.

Keywords: *Pekan Wayang, Pancasila, New Orde*

PENDAHULUAN

Negara dan kebudayaan bagaimanapun tidak bisa dipisahkan. Sejarah perkembangan kebudayaan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang cukup dinamis. Kepentingan negara yang hadir dalam bidang kebudayaan cukup kuat. Sejak awal lahirnya kemerdekaan, kesenian menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kepentingan negara—di masa Soekarno—untuk memberikan penerangan baik dalam konteks perjuangan kemerdekaan maupun dalam kepentingan politik kebudayaan. Kesenian wayang, terutama wayang kulit Jawa, menjadi bagian penting dari bagaimana kebudayaan disesuaikan dengan kepentingan negara.

Pada periode 1945-1949, melalui Departemen Penerangan RI, wayang kulit purwa menjadi bagian dari media propaganda negara dalam menggelorakan semangat nasionalisme dan memantapkan perjuangan kemerdekaan melalui *goro-goro*. Bahkan dalam perkembangannya di periode itu, terciptalah apa yang dikenal sebagai wayang suluh dan wayang pancasila. Yang *pertama* merupakan kreasi baru—di mana figur-figur wayang berupa wajah tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno—untuk penyuluhan dimasa revolusi, sementara yang *kedua* tetap

menjadi bagian dari wayang kulit purwa Mahabharata di mana Pandawa diberi tafsir keindonesian sebagai representasi simbol lima sila Pancasila dan di dalam representasi itulah pemantapan terhadap dasar-dasar negara dipropagandakan melalui pentas wayang (Soedarsono 2011: 213-214). Dalam perkembangannya di masa Orde Baru, bahkan nilai-nilai Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan atau persatuan, Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat serta Keadilan Sosial—juga diinternalisasi lebih kuat dalam wayang purwa melalui tafsiran tokoh dan lakon (Guritno 1988: 94-108).

Pentas wayang kulit menjadi pertunjukan yang sangat digemari masyarakat Indonesia, khususnya Jawa pada era Demokrasi Terpimpin. Hal ini terbukti dengan banyaknya rombongan wayang kulit (sebanyak 400 kelompok). Tetapi dalam periode ini juga kepentingan-kepentingan negara (Manifesto Politik Soekarno) melalui kesenian wayang kulit diperebutkan dan ditafsirkan oleh partai-partai politik, terutama kalangan komunis dan nasionalis (Soedarsono 2011: 216, Yuliantri dan Dahlan 2008: 354-360).

Kesenian wayang kulit tetap tidak bisa lepas dari kepentingan negara pasca Demokrasi Terpimpin. Di masa Orde Baru, pelembagaan atas kesenian wayang mewujud di mana kepentingan-kepentingan negara—dalam hal ini kepentingan pembangunan nasional Orde Baru—bisa diinternalisasi dalam pentas-pentas wayang. Dalam pertemuan dalang seluruh Indonesia pada 1969, Presiden Soeharto menekankan pentingnya dalang dalam pentas wayang untuk membina dan memelihara serta mempertinggi moril kehidupan bangsa (Buletin Pusat Pewayangan Indonesia, 1974, 6). Pada tahun itu, juga dilaksanakan Pekan Wayang Indonesia I, yang kemudian melahirkan Pusat Pewayangan Indonesia. Dalam kepanitiaan pekan wayang ini, menteri pendidikan dan kebudayaan serta menteri penerangan menjadi pelindung. Sejak Pekan Wayang Indonesia I ini dilaksanakan, proses-proses pelembagaan atas kesenian wayang semakin menguat. Pada 1975, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (Senawangi) dibentuk setelah pelaksanaan Pekan Wayang Indonesia II. Sejak ini, kemudian Pekan Wayang Indonesia terus dilaksanakan hingga yang keenam pada tahun 1993 di Jakarta di masa Orde Baru.

Kegiatan-kegiatan dalam Pekan Wayang Indonesia meliputi sarasehan (di mana kongres tentang wayang dilakukan), pagelaran, pameran dan lomba. Kegiatan sarasehan merupakan kegiatan inti di mana di dalamnya dibahas tentang pelembagaan, wayang dan pendidikan, pengindonesiaan wayang dan peningkatan mutu pedalangan. Dalam Pekan Wayang Indonesia inilah, negara (Orde Baru) hadir dan kepentingan-kepentingan negara dalam konteks pembangunan nasional terakomodasi dalam pentas wayang, terutama melalui sarasehan atau kongres yang menyertai kegiatan Pekan Wayang Indonesia.

Dari proses panjang itu bisa dilihat bahwa wayang menjadi penting dalam proses pembentukan tradisi nasional serta tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara. Pada masa pra Orde Baru, wayang menjadi bagian dari proses pencarian (menjadi) bangsa Indonesia, sementara pada masa Orde Baru, wayang menjadi bagian dari proses sentralisasi dan pendidikan negara (Boonstra 2014: 85-103). Adapun dalang wayang kulit menjadi bagian kepentingan Orde Baru dalam penyebarluasan propaganda. Pandangan ini pernah dikritik Soetjipto Wrosardjono (1992) bahwa dalang semestinya bukan propagandis apalagi politisi dan semestinya tidak partisan dalam pakelirannya (hlm. 66-67). Tetapi para dalang—di mana mereka menjadi semacam “juru penerang”—memang diminta untuk secara eksplisit maupun implisit menyisipkan pesan-pesan pembangunan Orde Baru (Ismaun dan Martono 1989: 79, Adi 2017: 105-117). Dari sini, bisa dipahami bahwa dalam politik kebudayaan Orde Baru, pentas wayang mengalami pengaturan dan kontrol—dalam bahasa resmi disebut sebagai pembinaan—sesuai kepentingan negara.

Tulisan ini berupaya melihat kembali bagaimana intervensi negara (Orde Baru) dalam kesenian wayang dengan menarasikan secara historis kehadiran Pekan Wayang Indonesia. Kegiatan ini di masa Orde Baru bukan sekadar kegiatan kebudayaan sepenuhnya, tetapi menjadi bagian dari politik kebudayaan Orde Baru. Pekan Wayang Indonesia merepresentasikan bagaimana pengaruh Orde Baru dalam kesenian wayang. Pengaruh ini hadir dalam wujud pelembagaan wayang.

METODE

Penelitian yang akan dilakukan—terkait topik Pekan Wayang Indonesia dan pengaruh Orde Baru—merupakan penelitian dengan menggunakan metode sejarah, meliputi pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, serta historiografi (Herlina 2020: 29-30). Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan lebih pada dokumen-dokumen seperti dokumen hasil kongres atau sarasehan dalam Pekan Wayang Indonesia dan Senawangi serta buletin pusat pewayangan Indonesia tahun 1974 serta tahun 1993. Dokumen-dokumen terbatas ini penting untuk dilihat dan dianalisis—kemudian dituliskan—guna memahami politik kebudayaan Orde Baru serta lebih khusus, pelebagaan Pekan Wayang Indonesia menjadi representasi kontrol negara Orde Baru pada kesenian wayang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hadirnya Pekan Wayang Indonesia

Dalam satu amanat di hadapan para dalang seluruh Indonesia yang hadir di Istana Merdeka Jakarta pada 12 April 1969, Presiden Soeharto menegaskan bahwa:

[...] untuk pemupukan mental rakyat Indonesia, maka saudara-saudara para dalang berkewajiban mengembangkan dan membina [...] seni pedalangan [...] menempati fungsinya [...] dalam membina dan memelihara serta mempertinggi moral sampai kepada semangat kepahlawanan dan sebagainya [...] untuk melangsungkan kehidupan Bangsa Indonesia [...] (Purwa Wacana 1974, 6).

Amanat presiden ini memberi petunjuk yang jelas bahwa dalang dan pewayangan Indonesia didorong untuk memiliki peran tidak hanya dalam konteks budaya *an sich*, tetapi juga dalam konteks politik pembangunan kebudayaan Orde Baru. Dalam merespons amanat ini, maka pada 24-28 Juli 1969 dilaksanakan Pekan Wayang Indonesia I di Taman Izmail Marzuki. Kegiatan ini diikuti oleh 171 peserta yang terdiri dari 82 dalang, 61 pecinta seni pewayangan serta 28 cendekiawan. Kebanyakan peserta berasal dari Jakarta, Bandung, serta Surakarta (Mulyono 1975: 118-119).

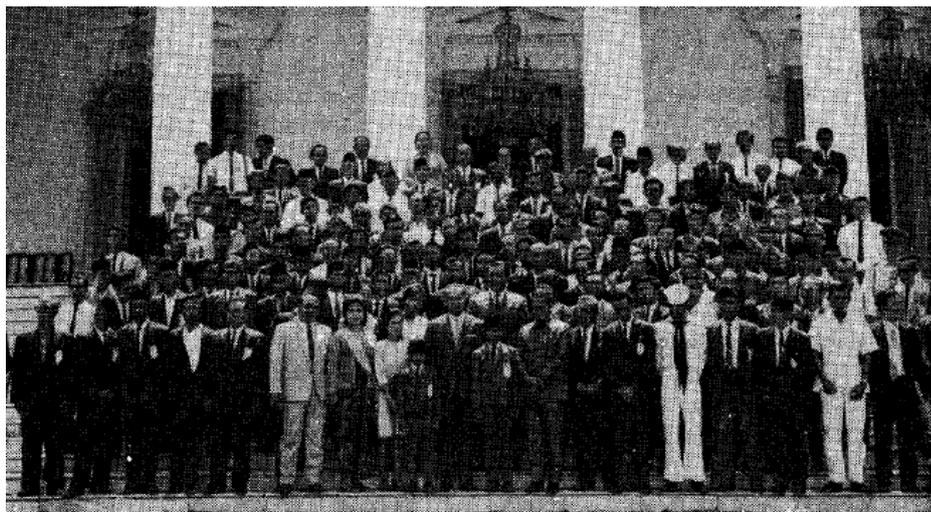
Tabel 1. Daftar jumlah peserta Pekan Wayang Indonesia

Asal wilayah	Jumlah peserta
Bali	10 orang
Yogyakarta	11 orang
Surakarta	30 orang
Jawa Timur	10 orang
Bandung	34 orang
Semarang	1 orang
Pekalongan	1 orang
Banyumas	1 orang
Purbolinggo	1 orang
Purworejo	1 orang
Jambi	1 orang
Jakarta	80 orang

Sumber: Mulyono 1975: 118

Dalam pekan wayang ini, disamping melakukan pentas (27 pagelaran wayang) juga dilangsungkan sarasehan. Kegiatan sarasehan ini membahas tentang “perbandingan seni pedalangan” (sidang sindikat C, diketuai Wahjati D.), “perbandingan teknik pergelaran wayang” (sidang sindikat B, diketuai Pandam Guritno), serta yang utama terkait “peran dalang dan pertunjukkan wayang di dalam masyarakat umum serta di dalam pembangunan negara” (perumusan sindikat A, diketuai Umar Kayam) (Purwa Wacana 1974: 30-38).

Gambar 1. Peserta Pekan Wayang Indonesia I bersama presiden Soeharto



Sumber: Mulyono 1975: 127; Mulyono 1989:112.

Pentas wayang dan sarasehan kemudian menjadi bagian penting dari perkembangan Pekan Wayang Indonesia. Respons berikutnya, pada 25-30 Maret 1974, digelar Pekan Wayang Indonesia II yang dilaksanakan di tempat yang sama, Taman Ismail Marzuki serta Aula Universitas Indonesia (UI). Pekan Wayang Indonesia II diketuai oleh Marsdya Boediardjo dengan wakil ketua Brigjen S. Brotosuhendro. Kegiatan pokok Pekan Wayang Indonesia II meliputi pagelaran, pameran dan lomba serta yang paling utama adalah sarasehan. Dalam kegiatan inti ini dibahas persoalan pelembagaan pewayangan Indonesia, wayang dan pendidikan, pengindonesiaan wayang serta peningkatan mutu pedalangan Indonesia (Purwa Wacana 1974: 8, Sarasehan Nasional Pewayangan Indonesia 1974).

Pada Juli 1978 dilaksanakan Pekan Wayang Indonesia III. Pembukaan dan penutupan Pekan Wayang Indonesia III diadakan di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah. Di dalam kegiatan ini, pertunjukan dan pameran diadakan di Taman Ismail Marzuki. Kongres diselenggarakan di gedung Joang 45 Jakarta (Dewan Harian Nasional) sementara sarasehan dalang dilakukan di gedung Direktorat Pengembangan Kesenian (senawangi.org, diakses pada 8 September 2021).

Pekan Wayang Indonesia IV diselenggarakan pada 1983 dengan pembukaan kegiatan bertempat di Taman Ismail Marzuki serta penutupan di Studio V RRI Jakarta. Dalam Pekan Wayang Indonesia IV kegiatan yang dilaksanakan masih meliputi sarasehan, lomba, dan pagelaran wayang. Secara berturut-turut, berselang lima tahun, Pekan Wayang Indonesia ke V tahun 1988 diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki sementara Pekan Wayang Indonesia VI pada 17-24 Juli 1993 diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabhakti. Dalam kegiatan ini pemerintah mendanai kegiatan melalui Sekretariat Negara serta dibantu oleh Direktorat Pengembangan kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (senawangi.org, diakses pada 8 September 2021).

Sepanjang kegiatan Pekan Wayang Indonesia masa Orde Baru, sarasehan serta kemudian kongres lembaga pewayangan menjadi bagian penting. Kongres dan sarasehan ini kemudian menghadirkan perbincangan serta implementasi gagasan

tentang wayang, kebudayaan Indonesia, serta pembangunan nasional Orde Baru. Peran-peran dalang dan pewayangan atas kebudayaan dan pembangunan nasional ini kemudian dinaungi dalam satu wadah melalui proses pelembagaan yang terkontrol negara. Hal ini tercermin dalam ungkapan Marsdya Boediardjo (1975):

Kongres Pewayangan diharapkan akan dapat menemukan suatu wadah [...] sebagai semacam “clearing house” begitu, demi meningkatkan dayaguna dalam kita-kita sendiri menampung serta menyalurkan hasrat serta minat dari masyarakat pewayangan. Wadah ini diperkirakan akan sanggup menyumbangkan jasa-jasanya secara timbal-balik antara Pemerintah dan Rakyat dalam memanfaatkan Wayang untuk kepentingan bersama dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional [...] (HLM.X-XI)

B. Orde Baru Dan Pelembagaan Pewayangan

Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Sri Sultan HB IX pada 21 Desember 1973, panitia Pekan Wayang Indonesia II membahas tentang pelembagaan pewayangan. Sri Sultan menegaskan bahwa bentuk pelembagaan wayang sebaiknya non pemerintah tetapi ikut “melakukan sebagian tugas pemerintah”. Lembaga ini akan mendapat subsidi pemerintah (Sarasehan Nasional Pewayangan Indonesia 1974). Sebelum Pekan Wayang Indonesia II digulirkan, pembentukan Pusat Pewayangan Indonesia telah dilakukan sejak Juli 1970 (Danusaputra 1974: 13). Lembaga ini direstui oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sri Sultan HB IX serta secara struktural, menteri pendidikan dan kebudayaan dan menteri penerangan menjadi pelindung serta penasehat lembaga ini terdiri dari Jenderal Soemitro, Letjen Soerono, Gubernur DKI serta ketua Dewan Kesenian Jakarta (Purwa Wacana 1974: 16). Pusat Pewayangan Indonesia yang beralamat di Cikini Raya nomor 73 ini kemudian—dibawah ketua D. Djayakusuma—merumuskan pedoman serta pembentukan panitia pelaksana Pekan Wayang Indonesia II (Keputusan Ketua Pusat Pewayangan Indonesia No. 3/K/SATWANDO/VIII/1973).

Pekan Wayang Indonesia II kemudian—karena salah satu tujuannya untuk memantapkan usaha Pusat Pewayangan Indonesia dengan peningkatan penataan dan kedudukan kelembagaan—melahirkan Sekretariat Nasional Wayang Indonesia (Senawangi). Kehadiran sekretariat ini secara resmi diumumkan pada 12 Agustus 1975. Senawangi menjadi semacam “sekretariat bersama” untuk mewadahi semua

organisasi, yayasan atau lembaga yang menangani pewayangan di Indonesia. Dewan formatur Senawangi terdiri tiga orang yang diketuai Marsekal TNI Boediardjo, dengan anggota-anggota dr. R. Abdullah (Laksda TNI Purn.) dan R.E. Hendro Mulyono (Mayor-TNI A.D.) Sedang Pandam Guritno ditunjuk sebagai penyusun Rencana Anggaran Dasar Senawangi. Pada akhir tahun 1975, susunan Dewan Pengurus Senawangi dan Rencana Anggaran Dasar telah selesai disusun (senawangi.org diakses pada 8 September 2021).

Pada periode krusial pembentukan pelembagaan wayang ini—diantara Pekan Wayang Indonesia I hingga II, dibentuk juga Yayasan Pembinaan Pewayangan Indonesia (Yayasan Nawangi) pada 21 Juni 1974. Yayasan ini didirikan oleh Marsekal Boediardjo bersama dengan 16 anggota lainnya (Letjen Ali Sadikin, Jenderal Soerono, Marsekal Saleh Basarah, Laksamana Muda Abdulah Ciptoprawiro, Letkol. Ir. Sri Mulyono, Brigjen Soepartono Brotosoehendro, Moh. Aribasah, Djadug Djayakusuma, Stephanus Manadjat Danusaputra, Ekana Siswaya, Prof. Ida Bagus Mantra, Sjamsoe Soegito, Soehartoyo, Amir Sutaarga, Roesdhi Iman Soedjono, serta Prof. Slamet Iman Santoso) (Warmansyah et al. 1984: 3). Di samping yayasan wayang, dibentuk juga himpunan dalang dalam wadah organisasi Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) pada 1971 di Yogyakarta (Danusaputra 1974: 16). Lembaga ini didirikan Jenderal Soerono dan pada 1975 mengubah sifat kedaerahan pada organisasi ini menjadi bersifat nasional (Puspaningrum 2018: 5-6, <https://pepadi.id/> diakses pada 28 Juni 2024).

Senawangi kemudian menjadi lembaga yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan Pekan Wayang Indonesia III hingga ke VI masa Orde Baru. Di dalam kegiatan Pekan Wayang ini, kongres Senawangi juga dilaksanakan. Kongres yang dilaksanakan oleh Senawangi selalu mendapat arahan dari pemerintah, termasuk kongres Senawangi ke V yang bertepatan dengan kegiatan Pekan Wayang Indonesia VI, diselenggarakan dibawah arahan langsung Menko Polkam Soesilo Sudarman (Hasil-hasil Kongres Senawangi ke V 1993). Sejak semula pelembagaan wayang Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah. Keterlibatan elit pemerintah, termasuk militer, dalam proses pelembagaan wayang

menunjukkan kepentingan kebudayaan negara dalam politik pembangunan nasional Orde Baru.

C. Kepentingan Pembangunan Nasional Orde Baru dalam Pentas Wayang

Perumusan sindikat A dalam hasil Sarasehan Pekan Wayang Indonesia I tahun 1969 yang diketuai Umar Kayam memuat secara spesifik kepentingan negara, di mana dalang harus menjadi juru penerang tentang kehidupan bangsa negara serta bertanggung jawab atas pembangunan dan perkembangan kebudayaan Indonesia. Lebih lanjut, pagelaran wayang juga dirancang, dalam sarasehan itu, untuk melengkapi pendidikan bangsa, digunakan untuk mengembangkan kepribadian bangsa serta menjadi media penyebar Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) (Purwa Wacana 1974: 30). Repelita merupakan kebijakan pembangunan Orde Baru dalam segala bidang, terutama sosial ekonomi (Rizki Rahmawati 2022: 38-41). Dalam konteks ini, sebelum Pekan Wayang Indonesia I, pertemuan di Jakarta pada April 1969 yang menghadirkan para dalang (sejumlah 59 orang) dan perwakilan-perwakilan pemerintah Orde Baru di antara Menteri Penerangan Boediardjo serta menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri juga telah membahas tentang dalang, wayang, dan Repelita ini. Dalam pertemuan ini, menteri penerangan menjelaskan bahwa pemerintah—dalam hal ini presiden—tidak bermaksud memberikan indoktrinasi kepada dalang, tetapi menghimbau sumbangan sukarela para dalang bagi Repelita yang baru saja dilancarkan. (van Groenendael 1987: 225). Sejak awal dalam pembentukan Pusat Pewayangan Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Pekan Wayang Indonesia I, lembaga formatur ini juga difungsikan sebagai proyek penyokong program pemerintah. Danusaputra (1974) menyatakan dengan tegas bahwa:

Dalam wujud dan kemampuannya sebagai suatu proyek [...], Pusat Pewayangan Indonesia telah berusaha dan berjuang untuk menumbuhkan dirinya dalam selera dan irama gerak pembangunan [...] ditengah-tengah gelora pelaksanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Pelita I/1969-1974 (HLM.13).

Dengan demikian, sebagai ketua panitia Pekan Wayang Indonesia II, Boediardjo dengan jelas menyebutkan bahwa hasil-hasil kegiatan pekan wayang ini sebagai bagian dari Repelita (Sarasehan Nasional Pewayangan Indonesia, 1974).

Presiden Soeharto sendiri kembali mengingatkan saat penyelenggaraan Pekan Wayang Indonesia III bahwa dalang wayang memiliki peran dan tugas untuk negara. Pesan pembangunan—dalam Repelita—dapat disampaikan dengan tetap menjaga tingkat artistik dan nilai-nilai tradisi wayang (Sears 1996: 233).

Pada kongres Senawangi ke V, Jenderal Soesilo Soedarman juga menyinggung kembali pentingnya memperhatikan kerangka Repelita dalam program dan sasaran kerja Senawangi di bidang kebudayaan (Hasil-hasil Kongres Senawangi ke V 1993: 9). Dalam Repelita ke V (1989-1994), pelaksanaan pentas wayang—bersama kegiatan pameran, ceramah dan temu ilmiah—menjadi salah satu komponen penting sasaran pembangunan nasional.

Tabel 2. Realisasi sasaran pameran, ceramah, temu ilmiah dan wayang

Tahun	Jumlah
1989/1990	31
1990/1991	33
1991/1992	51
1992/1993	57
1993/1994	50

Sumber: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Proyek Peningkatan Penyusunan Program dan Pengendalian Proyek
 Kebudayaan Jakarta 1993: 125

Sejak awal dilaksanakan Pekan Wayang Indonesia yang melahirkan pelembagaan wayang masa Orde Baru, kebijakan pembangunan bidang kebudayaan nasional menjadi arahan yang sangat jelas. Wayang harus diarahkan pada: (1) peningkatan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional, (2) pembinaan dan pemeliharaan tradisi serta peninggalan sejarah yang memiliki nilai perjuangan serta kebanggaan dan manfaat nasional, (3) pembinaan kebudayaan nasional yang sesuai dengan norma Pancasila (Purwa Wacana, 1974: 41).

Pentas wayang masa Orde Baru kemudian menjadi bagian penting dalam penyampaian program pembangunan pemerintah. Wayang digunakan sebagai media “penyuluhan” dan dalang menjadi agen penyampai pesan pembangunan Orde Baru (Akhyanto, Ahmad Nundhir, dan Suwardi 1988: 104). Wayang

kemudian juga diselaraskan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, di mana nilai-nilainya hadir dalam pentas wayang. Pandam Guritno yang aktif sebagai panitia sejak Pekan Wayang Indonesia I berusaha merumuskan internalisasi Pancasila ini. Menurut Guritno (1988),

[...] sila-sila yang terdapat di dalamnya [Pancasila-red] bersifat universal yang dapat berlaku sepanjang masa dan seluruh dunia, karena asas-asas agung yang dapat diterapkan di manapun oleh bangsa apapun. Dalam wayang purwa asas-asas itu dikenal juga (HLM 97).

D. Internalisasi Pancasila dalam Wayang

Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, harus tetap diterapkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dalam Pancasila dapat diketahui berdasarkan nilai, norma dan praksisnya, yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan setiap individu (Kaelan 2013: 685). Sejak Pekan Wayang Indonesia I hingga II, pembahasan tentang wayang dan Pancasila juga telah dilakukan. Boediardjo (1974) menjelaskan bahwa: “wayang kiranya akan sanggup mengajak tanpa membujuk rakyat Indonesia menuju ke suatu tata hidup yang selama ini selalu dirindukan dan diidamkan, yaitu tata masyarakat Pancasila (hlm.3). Pembahasan Pancasila, terutama dalam Pekan Wayang Indonesia II, lebih banyak muncul dalam prasaran-prasaran wayang dan pendidikan serta pelebagaan. Wayang melalui lakon dan aspeknya dimaknai memiliki nilai pendidikan serta lakon wayang mengandung simbolisme dan tendensi yang baik (Kesimpulan Sidang Sarasehan 1974: 1). Karena itu, dalam prasarannya Notonagoro (1974) menjelaskan, “wayang mendapatkan nilai-nilai kerohanian yang luhur untuk dipergunakan dalam pendidikan...kepribadian nasional Pancasila dalam rangka pembangunan nasional” (hlm.1-2).

Internalisasi dilakukan dalam beberapa kajian terhadap wayang dengan cara memasukkan tafsir nilai-nilai sila-sila Pancasila dalam lakon dan tokoh (karakter) tokoh wayang. Termasuk secara fisik pembuatan wayang Pancasila pada 1980an yang mirip dengan Wayang Purwa, Gedog dan Klitik. Satu ciri yang kuat pada wayang ini, kayon kemudian disesuaikan dengan lambang Garuda Pancasila (Isma'un dan Martono 1989: 74). Proyek internalisasi nilai Pancasila secara implisit

hadir dalam penulisan buku arti dan makna tokoh pewayangan baik Ramayana dan Mahabarata untuk tujuan pembentukan dan pembinaan watak yang terbit pada 1994, setelah pelaksanaan Pekan Wayang Indonesia VI, oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Suhardi, Wisnu Subagijo, Suyanto 1994; Purna dan Sri Mintosih 994). Secara eksplisit, tafsir atas sila-sila Pancasila dalam wayang telah dituliskan secara menyeluruh oleh Pandam Guritno (1988) dalam “asas-asas Pancasila dan Peragaannya dalam Wayang Purwa”. Tulisan Guritno berupaya menunjukkan macam-macam lakon wayang yang dapat dikaitkan dengan sila Pancasila (hlm. 94-108).

Sila pertama dalam wayang purwa terdapat banyak dewa-dewi yang dihormati. Meskipun terdapat banyak dewa dewi yang dihormati, dalam gambaran bentuk wayang, hukum-hukum yang sudah ada tidak boleh dilanggar. Hal ini disebabkan para dewa tetap akan menghukumnya dengan adil. Sebenarnya para dewa-dewi dalam pewayangan hanya makhluk Tuhan Yang Maha Esa, hal ini tertulis dalam *Serat Kanda* dan *Serat Paramayoga* karya Raden Ngabehi Ronggowarsito pujangga Kraton Surakarta. Tokoh dewa dewi dalam wayang yang tertulis pada kedua serat itu digambarkan sebagai keturunan Nabi Adam (Guritno 1988: 97). Menurut Guritno, yang disebut dengan Hyang Suksma Kawekas atau Hyang Akarya Jagad dalam wayang merupakan manifestasi Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak diwujudkan dalam satu bentuk wayang (hlm.96-97). Analisis yang dilakukan Adhikara atas lakon Nawaruci misalnya berupaya menunjukkan tafsir *panteistik* atas sila pertama dalam apa yang disebut dengan “imanensi ketuhanan dalam bima”. Adhikara (1984) menjelaskan,

Dalam cerita Nawaruci, Tuhan Yang Maha Esa pertama kali disebut ketika Bima menemui ajalnya kemudian dihidupkan kembali oleh Sang Hyang Nawaruci, sebagai penjelmaan Sang Hyang Murti. Dari sifat-sifat Sang Hyang Murti [...] dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Sang Hyang Murti adalah Tuhan Yang Maha Esa (HLM.72, 90-91).

Menurut Guritno (1988), sila kedua dan sila ketiga dalam Pancasila terdapat makna asas kemanusiaan dan kebangsaan. Kedua sila dalam Pancasila ini digambarkan dalam lakon Ramayana yang menceritakan bahwa Rahwana menculik Dewi Sinta, kemudian mendapatkan pertentangan dari Kumbakarna dan Wibisana.

Pertentangan yang dilakukan oleh kedua adiknya membuat Rahwana murka dan menuduh kedua adiknya sebagai penculik Dewi Sinta, yang membuat kedua adiknya dikeluarkan dari ibu kota kerajaan. Kumbarkama pergi ke Pangleburgangsa untuk melakukan bertapa dan membela tanah airnya, sedangkan Wibisana memutuskan untuk memihak kepada Rama. Ketika Wibisana memihak kepada Rama, membuat keduanya berhasil memusnahkan Rahwana dan bala tentaranya. Perbuatan yang dilakukan oleh Wibisana untuk membela kebenaran dari kejahatan di luar kemanusiaan (hlm.100-102).

Tafsir atas sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digambarkan pada tokoh wayang Semar. Tokoh Semar merupakan saudara tua Bathara Guru, hidup sepanjang zaman (zaman para dewa hingga zaman Pandawa), meskipun fungsi Semar dalam penokohan wayang yang tergolong hamba sahaya, tua, wujudnya buruk dan kasar tingkah lakunya tapi ia lebih kuasa dari para dewa. Gambaran Semar dalam penokohan wayang tersebut dapat diartikan bahwa Semar seperti rakyat biasa yang dapat menyuarakan pendapat atau dapat diartikan bahwa kedaulatan di sebuah negara berada di tangan rakyat (hlm.102-104).

Sementara tafsir atas nilai sila kelima tentang keadilan sosial dalam cerita pewayangan terdapat pada lakon wayang purwa. Pada lakon wayang purwa terdapat cerita mengenai masing-masing tokoh wayang purwa dan keturunannya (Kats 1923: 90-98). Pandu bersikap adil kepada kedua istri dan lima anaknya. Keluarga Pandu yang terdiri dari Dewi Kunthi, Dewi Madrim, Yudisthira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa saling menyayangi satu sama lain, kemudian juga saling gotong-royong dan tidak memandang buruk atau lebih satu sama lain. Sebagai contoh ketika Nakula dan Sadewa masih bayi juga diasuh dan diberikan kasih sayang oleh Dewi Kunthi. Padahal, ibu dari Nakula dan Sadewa adalah Dewi Madrim. Guritno (1988) juga mengutip *janturan* dalang dalam pembukaan pentas wayang purwa di mana penguasa selalu memberi pertolongan, membantu, serta mengayomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (hlm.107).

Internalisasi Pancasila dalam kesenian wayang di masa Orde Baru menjadi sangat penting. Wayang sebagaimana ungkapan-ungkapan yang muncul dalam sarasehan Pekan Wayang Indonesia, bukan sekedar seni tontonan masyarakat, melainkan menjadi media himbauan agar senantiasa menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai langkah untuk membentuk suatu kepribadian, cara berpikir, serta tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, tafsir-tasfir nilai Pancasila dalam wayang dilakukan oleh elemen-elemen Orde Baru di sepanjang pelaksanaan Pekan Wayang Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam perkembangan budaya Indonesia masa Orde Baru, intervensi negara tampak kuat. Pagelaran wayang tidak bisa sepenuhnya lepas dari kepentingan negara. Orde Baru bukan yang pertama kali memanfaatkan wayang sebagai media propaganda kepentingan negara. Tetapi, Orde Baru masif mengintervensi wayang, melalui kegiatan dan kelembagaan wayang. Pekan Wayang Indonesia serta lembaga yang dibentuk beriringan dengan kegiatan itu, Pusat Pewayangan serta Senawangi, mendapat arahan langsung dari presiden dan elit negara. Kegiatan sarasehan dan kongres lembaga digunakan Orde Baru untuk menyampaikan (propaganda) politik pembangunan nasional.

Dalam budaya otoritarian, di mana peran negara mengalami peningkatan kuat, kebijakan budaya dirumuskan dengan asumsi bahwa mayoritas subyek suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk menghayati kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, membutuhkan bimbingan negara dalam pilihan budaya mereka (Jones 2015: 35). Dengan demikian, dalam konteks lebih kecil, kesenian wayang yang menjadi bagian dari bangunan kebudayaan Indonesia juga harus mendapat bimbingan negara. Praktiknya, pelembagaan pewayangan berada dalam kontrol negara karena melibatkan aktor-aktor negara dalam strukturnya. Wayang dalam proses kegiatan keseniannya lalu menjadi subyek yang tidak otonom ini.

Kepentingan-kepentingan negara yang hadir dalam kesenian wayang masa Orde Baru, untuk penyuluhan (propaganda) pembangunan nasional serta Pancasila

menempatkan lembaga pewayangan yang hadir beriringan dengan apa yang dinamakan Pekan Wayang Indonesia, menjadi bagian apa yang disebut Luis Althusser (2007), sebagai bagian dari aparatus ideologi negara (hlm. 165-169). Mereka menjadi semacam institusi kebudayaan di luar negara, tetapi menjadi bagian dari negara dalam konteks bagaimana lembaga ini berperan dalam penyebaran-penyebaran kepentingan negara. Dalam hal ini, Pekan Wayang Indonesia, menjadi bagian penting penyebaran/penyuluhan tentang pembangunan nasional Orde Baru dan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Danusaputra, St. Munadjat. 1974. "Pelebagaan Wayang". Prasaran pada Pekan Wayang Indonesia II/1974.

Hasil-hasil Kongres Senawangi ke V tahun 1993. Pekan Wayanag Indonesia ke VI. Jakarta, 17-24 Juli 1993.

Kata sambutan Boediardjo dalam Pekan Wayang Indonesia II/1974 tertanggal 25 Maret 1974.

Keputusan Ketua Pusat Pewayangan Indonesia No. 3/K/SATWANDO/VIII/1973. "Tentang pembentukan Panitia Pekan Wayang Indonesia II/1974" tertanggal 17 Agustus 1973

Pedoman Dasar Pekan Wayang Indonesia II/1974 tertanggal 17 Agustus 1974
Purwa Wacana. Pekan Wayang Indonesia II/1974 (25-30 Maret 1974). Pusat Pewayangan Indonesia.

Sarasehan Nasional Pewayangan Indonesia. Pekan Wayang Indonesia II. 26, 27 dan 28 Maret 1974 di Aula Universitas Indonesia Jakarta.

Kesimpulan Sidang Sarasehan "Wayang dan Pendidikan" dalam Pekan Wayang Indonesia II 1974 tertanggal 28 Maret 1974.

Notonagoro. 1974. "Wayang dan Pendidikan". Sarasehan Nasional Pewayangan Indonesia. Pekan Wayang Indonesia II, tertanggal 23 Maret 1974.

Buku, disertasi, skripsi dan artikel jurnal

Adi, Fadhil Nugroho. 2017. "Peranan Dalang Wayang Kulit dalam Propaganda Pembangunan di bawah Orde Baru." *Jahtra* 12 (2): 105-118.

- Adhikara, SP. 1984. *Cerita Nawaruci*, Bandung: Penerbit ITB.
- Akhyanto, Ahmad Nundhir, dan Suwardi. 1988. "Perspektif Wayang dalam Pertumbuhan Kebudayaan Nasional", *Cakrawala Pendidikan* No, 1 Tahun VII Edisi Dies Natali, XXIV: 92-111.
- Althuser, Luis. 2007. *Filsafat sebagai Senjata Revolusi*, Yogyakarta: Resist Book.
- Anggoto, Bayu. 2018. "Wayang dan Seni Pertunjukan: Kajian Sejarah Perkembangan Seni Wayang di Tanah Jawa sebagai Seni Pertunjukan dan Dakwah." *Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2 (2): 122-133.
- Azzaria, Shabika. 2021. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Milenial." *Diktrum* 19 (1): 57-74.
- Boonstra, Sadiah Nynke. 2014. "Changing wayang scenes: Heritage formation and wayang performance practice in colonial and postcolonial Indonesia." Disertasi, Vrije Universiteit Amsterdam.
- Budiardjo. 1975. "Se-untai Udasmara" hlm.X-XI dalam *Wayang. Asal usul, filsafat dan masa depannya I asal usul dan pertumbuhannya*, ditulis oleh Sri Mulyono, Jakarta: ALDA Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Peningkatan Penyusunan Program dan Pengendalian Proyek Kebudayaan Jakarta. 1993. *Evaluasi Pelaksanaan Repelita V Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (1989/1990-1993/1994)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Peningkatan Penyusunan Program dan Pengendalian Proyek Kebudayaan.
- Guritno, Pandam. 1988. *Wayang, Kebudayaan Indonesia dan Pancasila*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Ismaun, Banis dan Martono. 1989. *Peranan Koleksi Wayang dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jones, Tod. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia. Kebijakan Budaya Abad ke 20 hingga Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila. Historis, Kultural, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kats, J. 1923. *Het Javaansche Toneel Deel I: Wayang Poerwa*, Weltevreden: Commissie voor de Volkslectuur.

- Mulyono, Sri. 1975. *Wayang. Asal usul, filsafat dan masa depannya I asal usul dan pertumbuhannya*, Jakarta: ALDA Jakarta.
- Mulyono, Sri. 1989. *Wayang. Asal usul, filsafat dan masa depannya*, Jakarta: Haji Masagung.
- Purna, I Made dan Sri Mintosih. 1994. *Arti dan Makna Tokoh Pewayangan Mahabarata dalam pembentukan dan Pembinaan Watak (Seri I)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- Puspaningrum, Wulandari. 2018. "Persatuan Pedalangan Indonesia dan Perannya dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang (1971-2013)." Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
- Rahmawati, Rizki. 2022. "Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru" *Etnohistori IX (2)*: 36-42.
- Sabunga, Barnas, Dasim Budimansyah, dan Sofyan Sauri. 2016. "Nilai-nilai Karakter dalam Pertunjukan Wayang Golek Purwa." *Jurnal Sosioreligi 14 (1)*: 1-13.
- Sears, Laurie J. 1996. *Shadows of Empire. Colonial Discourse and Javanese Tales*, London: Duke University Press.
- Soedarsono, R.M.. 2011. *Seni Pertunjukan dari Perspektif Politik, Sosial dan Ekonomi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suhardi, Wisnu Subagijo, Suyanto. 1994. *Arti dan Makna Tokoh Pewayangan Ramayana dalam pembentukan dan Pembinaan Watak (Seri I)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- van Groenendael, Victoria M. Clara. 1987. *Dalang di Balik Wayang*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Warmansyah, G.A. et al. 1984. *Buku Petunjuk Museum Wayang Jakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman DKI Jakarta.
- Wrosardjono, Soetjipto. 1992. "Dalang sebagai Agen Pembangunan" HLM. 66-67 dalam *Nilai-nilai Seni Pewayangan*, disunting oleh Suwaji Bastomi, Semarang: Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan Jawa Tengah.

Yuliantri, Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M. Dahlan. 2008. *Lekra Tak Membakar Buku*, Yogyakarta: Merakesumba.

Situs web

<https://pepadi.id/>

<https://senawangi.org/>